

Implementasi E-Government pada Website Bursa Kerja Online di Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Anjar Aulia Isnaini¹⁾, Komang Adi Sastra Wijaya²⁾, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti³⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: anjaraulia@gmail.com¹⁾, sastra_wijaya@unud.ac.id²⁾, wiwin.fisip@gmail.com³⁾

ABSTRACT

The background of the research is Presidential Instruction No. 3 of 2003 which requires all government agencies to implement E-government. The Denpasar City Manpower and Competency Certification Office implement an online job fair E-government website. The purpose of this research is to look at the implementation and obstacles in implementing the Denpasar City online job fair website using six key indicators for the success of policy implementation. The results of this study indicate that the implementation of E-government can be said to run quite smoothly. This can be seen from the six indicators used, namely bureaucratic compliance, smooth routines and no problems, performance, support, capacity have been running well, but values have not been fully run optimally. It can be seen from the graph in 2017 and the lack of website updates so that website visitors decrease and make the implementation of E-government less than optimal.

Keywords : Public Service, E-Government, Online Job Market, Resources

1. PENDAHULUAN

Good governance adalah salah satu tujuan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap lembaga atau instansi pemerintah saat ini berlomba-lomba dalam melaksanakan penyelenggara pelayanan untuk menjadi yang terbaik dengan capaian *good governance*. Pelayanan publik menjadi bagian penting dalam pencapaian tujuan pemerintahan yang baik. Bahkan, pelayanan publik menjadi indikator penting dalam rangka *good governance*. Pelayanan publik berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai penerima pelayanan dimana seluruh aspek pelayanan publik bertumpu pada kepuasan masyarakat.

Perkembangan informasi, komunikasi dan teknologi (*Information, Communication and Technology/ICT*) di era globalisasi sekarang menuntut perubahan pada pola dan cara dilaksanakannya kegiatan di

segala sektor yang meliputi industri, perdagangan, pertahanan, keamanan, pendidikan, sosial, tenaga kerja dan juga pemerintahan sudah semakin meluas di hampir seluruh dunia.

Melihat adanya peningkatan penggunaan teknologi yang semakin pesat, pemerintah kemudian berupaya dalam meningkatkan dan mengembangkan sistem pemerintahan yaitu dengan mengeluarkan Intruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-government*. Oleh karenanya pelayanan lowongan pekerjaan dengan penempatan tenaga kerja yang sesuai telah dikembangkan melalui website bursa kerja online. Dibuatnya website tersebut dengan tujuan agar pencari kerja dan pencari tenaga kerja khususnya Kota Denpasar dapat melakukan akses langsung secara transparan, cepat, efisien dan efektif.

Website bursa kerja online dalam pelaksanaannya tidak lepas dari masalah yaitu salah satunya jumlah pengunjung website yang menurun. Hal itu dikarenakan perusahaan melakukan rekrutmen tenaga kerja tidak melalui lembaga yang telah disediakan, melainkan melalui cara lainnya seperti langsung dari sekolah, pemasangan iklan di Koran dan di media sosial, dan lain-lain. Hal tersebut membuktikan bahwa tingkat pemanfaatan Bursa Kerja Online di Kota Denpasar masih rendah.

2. KAJIAN PUSTAKA

1) MODEL RIPPLEY DAN FRANKLIN

Model implementasi ini lebih menegaskan kebijakan yang siap diimplementasikan akan berhasil jika memperhatikan dan mensinergikan tiga faktor utama, yakni:

- 1) Tingkat kepatuhan birokrasi, artinya setiap aparatur dalam birokrasi atau implementor kebijakan publik dituntut memiliki sikap dan *mentality* yang mewujud pada tindakan yang patuh dan taat asas dalam melaksanakan setiap kebijakan.
- 2) Kelancaran rutinitas dan tiada masalah. Dalam hal ini implementor kebijakan publik sedapat mungkin meminimalisir setiap permasalahan yang ditemui dalam proses implementasi kebijakan publik. Setiap implementor menjadi *problem solver* bukan malah sebaliknya.
- 3) Kinerja. Setiap pelaksanaan kebijakan pada akhirnya bermuara

pada efektif tidaknya proses implementasi dan kebijakan itu sendiri. Efektifnya proses implementasi kebijakan tentunya akan melahirkan apa yang disebut optimalisasi kinerja kebijakan, tetapi efektivitas dan optimalisasi kinerja kebijakan pun ditentukan kinerja individu dan para implementor kebijakan publik itu sendiri memberikan sanksi atas pelanggaran.

2) HASIL KAJIAN DARI HARVARD JFK SCHOOL OF GOVERNMENT DALAM INDRAJIT (2004:15-18)

Menurut hasil kajian dalam menerapkan konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga aspek penting sebagai kunci keberhasilan penerapan *E-government* yaitu:

- 1) *Support* atau dukungan yang dimaksud meliputi sumber daya terutama sumber daya finansial, komitmen pemerintah dalam menjalankan program, dan juga infrastruktur dan superstruktur pendukung yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan kondusif dalam pengembangan *e-government*.
- 2) *Capacity* yaitu adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah. Ada dua hal minimum yang paling tidak harus dimiliki pemerintah yakni ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *E-government* serta ketersediaan

sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *E-government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan dan juga ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan *E-government*.

- 3) *Value* yakni pemerintah harus benar-benar teliti memilih jenis aplikasi *E-government* yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan *value* (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya.

Dalam penelitian ini, indikator model Rippley dan Franklin juga hasil kajian dari *Harvard JFK School of Government* dipilih karena indikator ini dianggap dapat menggambarkan secara nyata hasil dari program website bursa kerja online. Penulis menganggap indikator ini dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program *e-government* pada website bursa kerja online di Disnaker Kota Denpasar.

3. METODELOGI PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan pada penelitian implementasi *E-government* ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2015, 15), penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrument kunci. Data kualitatif didapat dari teknik wawancara dan observasi. Selain melalui wawancara, penelitian ini juga

menggunakan data sekunder, yaitu data atau informasi yang diperoleh pada artikel, literatur, jurnal, dan lain sebagainya dalam teknik pengumpulan data.

Penelitian tentang pengawasan ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang tidak menutup kemungkinan menjadi *snowball sampling* dalam penentuan informannya. Ini disebabkan karena informasi yang diberikan informan utama dirasa belum lengkap. Adapun teknik analisis data yang digunakan menurut Sugiono (2015: 246), diawali dengan reduksi data, penyajian data, hingga sampailah pada kesimpulan. Data pada penelitian ini disajikan berupa teks, table, bagan, dan grafik. Akan tetapi secara garis besar berupa teks dalam bentuk kalimat yang didukung dengan data-data berupa table.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menggunakan indikator dari kunci keberhasilan kebijakan menurut Rippley dan Franklin, dan juga kunci keberhasilan penerapan *E-government* menurut hasil kajian dari *Harvard JFK School of Government* dalam Indrajit (2004:15-18). Adapun indikator-indikator tersebut adalah:

1) KEPATUHAN BIROKRASI

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dalam pemenuhan standar birokrasi juga selalu menerapkan berbagai upaya dari partisipasi masyarakat dalam penilaian website. Dinas Tenaga Kerja dan

Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar melakukan survey kepada pengguna website untuk bisa diambil penilaian apakah pelayanan sudah sesuai dengan standar pelayanan publik atau masih kurang dari standar.

2) KELANCARAN RUTINITAS DAN TIADA MASALAH

Pelaksanaan fungsi *E-government* sendiri di Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar sudah berjalan dengan sebagaimana fungsi pelaksanaannya walaupun masih ada beberapa kendala yang biasanya terjadi pada bagian sistem. Namun dengan SDM yang berkompeten dalam setiap bidangnya dan mentaati setiap aturannya, maka program ini telah berhasil dan dapat berjalan sesuai dengan pelaksanaan fungsi dari *E-government*.

3) KINERJA

Menurut hasil temuan di Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar akhir-akhir ini website nya sudah mulai berjalan lancar dan efisien. Tidak ada masalah yang berarti, dan membuat lembaga mitra atau perusahaan dapat langsung menginformasikan perihal lowongan kerja ke website bursa dengan prinsip cepat, tepat, dan benar.

4) SUPPORT/PENDUKUNG

Prioritas tinggi diberikan untuk program E-Government di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dengan melakukan peningkatan kemampuan operator di

bidang IT dengan mengadakan bimbingan dan pelatihan di setiap kecamatan. Saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan mutu kerja dengan cara selalu rutin memonitor tim dan melakukan bimbingan atau kerja praktik berskala kepada masyarakat agar program elektronisasi ini bisa terealisasi dengan sukses dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terbukti dengan adanya penunjang operator yang paham teknologi maka dari segi kualitas SDMnya meningkat dan kevalidan datanya pun meningkat. Begitu pun dari segi finansial, kendala yang selama ini dihadapi para operator telah terselesaikan dengan adanya dana yang tersalurkan tepat sasaran.

5) CAPACITY/KAPASITAS

Capacity atau Kapasitas, Ketersediaan sumber daya, dalam mengembangkan *E-government* terlebih sumber daya manusia, baik pencari lapangan kerja dan penyedia lapangan kerja. *E-government* ini sangat memudahkan masyarakat terutama masyarakat Kota Denpasar dalam memenuhi keinginan dalam mencari kerja serta membuka lowongan kerja.

6) VALUE/MANFAAT

Saat ini informasi yang ada di website resmi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar masih belum baik. Karena kurangnya informasi yang lengkap mengenai lowongan kerja, baik alamat perusahaan, kandidat yang dipilih, jobdesk yang kurang jelas dan lainnya. Selain itu kurang adanya follow up dari

perusahaan sehingga lowongan yang sudah ditutup masih terakses aktif, atau ketika belum menemukan kandidat namun informasi sudah tertutup dengan lowongan yang lain.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian Implementasi E-government pada Website Bursa Kerja Online Kota Denpasar sudah sejauh ini terlaksana sesuai yang diharapkan walaupun masih terdapat beberapa kekurangan pada poin-poin tertentu. Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini berdasarkan kunci keberhasilan penerapan *E-government* menurut hasil kajian dari *Harvard JFK School of Government* dalam Indrajit (2004:15-18) adalah sebagai berikut:

1) SUPPORT/PENDUKUNG

Support atau dukungan yang diberikan oleh Pemerintah sudah sangat baik, dengan pelatihan-pelatihan yang disediakan dan diberikan dari Kabupaten hingga ke Kecamatan, memberikan finansial dan fasilitas penunjang kinerja Operator.

2) CAPACITY/KAPASITAS

Capacity atau Kapasitas di nilai sangat baik, dengan ketersediaan SDM yaitu operator yang telah disiapkan dengan ilmu dan *skill* dari pelatihan-pelatihan yang telah diberikan Dinas Sosial. Kemudian terkait dengan sumber daya finansial melalui Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar.

3) VALUE/MANFAAT

Value atau Manfaat dari adanya program Website Bursa Kerja Online di Kota Denpasar sudah dirasakan oleh

masyarakat dengan tersedianya data yang lebih akurat, informasi lowongan kerja yang lebih mudah diakses dan lebih terupdate dalam informasi seputar lowongan kerja yang tersedia dan minat kerja masyarakat.

6. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Achmad, Badu. dkk. Modul Mata Kuliah. 2013. *Electronic Government (E-Gov)*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Indrajit, Richardus Eko. 2004. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi.

Pasalong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Prasetyo, Bambang & Jannah, Lina Miftahul. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Sugiyono. 2000. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutabri, Tata. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi.

Syafiie, Inu Kencana. 2008. *Ilmu administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik, Teori, Analisis, dan Proses*. PT. Bumi Aksara.

Sumber Dokumen dan Arsip:

SOP Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar.

Sumber Karya Ilmiah atau Jurnal:

Heryana, Toni & Dewi Sari Kartika. 2013. *Pengaruh Penerapan E-government Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Cianjur*. Universitas Pendidikan Indonesia. Tersedia: [https://www.researchgate.net/publication/319104620/](https://www.researchgate.net/publication/319104620) (diakses 20 Mei 2018)

Kurniasih, Dewi & Fidowaty, Tatik. 2013. *Pengaruh Implementasi Kebijakan E-Government Terhadap Kinerja Aparatur Kota Cimahi*. Universitas Padjajaran. Tersedia: <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5234> (diakses 5 Juni 2018)

Sari, Kurnia Dewi Arum. 2012. *Implementasi E-government System dalam Upaya Peningkatan Clean and Good Governance di Indonesia*. Universitas Jember. Tersedia: <http://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEAM/artikel/view/1192> (diakses 5 Juni 2018)

Skripsi

Safitri, Nurul Wahida. 2016. "Penerapan E-government di Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kabupaten Pinrang". Skripsi pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin 2016.

Nainggolan, Desriani Paulina. 2018. "Strategi Penerapan E-government di Kota Pekanbaru". Skripsi pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau 2018.